

Implementasi Pencatatan Akuntansi Berdasarkan SAK EMKM Dalam Pemberian Bantuan Modal Usaha Dengan Pendekatan Theory Investment Pada UMKM di Kabupaten Sorong

Septi Angrayni^{1*}, Munzir², Pahmi³ dan Annisa' Khaerani⁴

^{1,2,4}Akuntansi, Ekonomi Bisnis Dan Humaniora, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

³Manajemen, Ekonomi Bisnis Dan Humaniora, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Abstrak.

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui penerapan laporan keuangan yang disusun oleh pelaku UMKM. (2) Untuk mengetahui bagaimana pelaku UMKM di Kabupaten Sorong memahami dan menerapkan pencatatan akuntansi berbasis SAK EMK. (3) Untuk mengetahui berbagai kendala yang dialami UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sejumlah pelaku UMKM di Kabupaten Sorong. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan pencatatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM di kalangan UMKM Kabupaten Sorong masih sangat rendah. Belum adanya sistem pencatatan yang terstandarisasi menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam mengelola keuangan usaha secara optimal. dalam kerangka Theory of Investment, pelaku UMKM di Sorong masih berada pada tahap awal investasi yang sangat terbatas pada sumber internal (internal financing). Kendala UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAK EMKM Terdapat tiga kendala utama yang dihadapi UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar, yaitu: (a) kurangnya pemahaman dan literasi akuntansi, (b) keterbatasan waktu karena fokus pada kegiatan operasional harian, dan (c) belum tersedianya pendampingan serta sarana pencatatan yang memadai. Faktor-faktor ini membuat pelaku UMKM kesulitan dalam menerapkan SAK EMKM secara efektif

Keywords. SAK EMKM, UMKM, Laporan Keuangan, Bantuan Modal Usaha, Theory Of Investment.

*Corresponding Author : angraynisepti@gmail.com

PENDAHULUAN

Di kabupaten sorong ada lebih dari 6.000 UMKM yang terdaftar sedangkan lebih dari 10.000 UMKM yang terdaftar di pusat. Pemerintah daerah telah melakukan survey dan memberikan bantuan kepada UMKM ini. Di kabupaten sorong, UMKM terdiri dari berbagai macam bisnis, termasuk koperasi dan bisnis kuliner seperti kue dan berbagai jenis makanan. Terdapat kelompok UMKM nusantara ada di distrik Salawati, Aimas, dan Mayamuk. UMKM yang paling banyak ada di Aimas, Mariat, Mayamuk, dan Salawati. Menurut data Pusat Usaha Layanan Terpadu (PULT) pada tahun 2023 ada 1.426 UMKM yang aktif baik dalam produksi maupun non-produksi (Asriani, 2023)

Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya dalam hal pengelolaan dana. Sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan, menyusun laporan keuangan, dan mengelola dana dengan baik. Dalam operasional sehari-hari, UMKM harus mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam periode tertentu, yang kemudian dirangkum dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Mulyani et al., 2019);(Way & Wulandary, 2025).

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah signifikan (Judijanto et al., 2025). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM mencakup sekitar 99 persen dari total sektor usaha di Indonesia. Meski kontribusi ekonomi yang diberikan UMKM cukup besar, pengelolaan usaha ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan (Hanum et al., 2024). Catatan keuangan sangat penting bagi keberhasilan organisasi, namun banyak UMKM yang kurang menyadari pentingnya. Penting untuk menganalisis seluruh pendapatan dan pengeluaran agar operasi bisnis dapat dipantau dengan lebih efektif (Amanda & Rialdy, 2024). Langkah ini membantu dalam menghitung modal yang diinvestasikan serta tingkat profitabilitas perusahaan (Siti Ardila, 2022)

Meskipun UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara (Munzir, Anwar, et al., 2024), hal ini tidak menjamin bahwa mereka mampu mengelola operasionalnya dengan efisien (Munzir, Zulkifli, et al., 2024). UMKM, terutama usaha mikro, sering menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis mereka (Rialdy & Melisa, 2023). Penilaian kinerja sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis kemampuannya dalam bersaing. Faktor seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, peningkatan kualitas, dan kegiatan promosi memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan organisasi (Amanda & Rialdy, 2024)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peluang besar untuk berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi oleh pelaku UMKM di kabupaten sorong dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Hambatan yang di alami pelaku UMKM di kabupaten sorong yaitu dalam menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) juga di pengaruhi oleh tingkat pengalaman para pelaku usaha. Secara umum, pengalaman para pelaku usaha. Secara umum, pengalaman mereka masih tergolong rendah, sehingga menyulitkan dalam penerapan standar akuntansi yang berlaku (Munzir, 2023)

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, klasifikasi usaha ditentukan berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan. UMKM menyumbang lebih dari 60%

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lebih dari 97% lapangan kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023) (Maryani & Abidin, 2021). Namun demikian, UMKM masih menghadapi sejumlah hambatan struktural, seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kemampuan manajerial, serta belum optimalnya penerapan pencatatan keuangan .

SAK EMKM Terkait dengan aspek pencatatan keuangan, banyak pelaku UMKM belum menerapkan standar akuntansi yang memadai (Munzir, 2023), sehingga menghambat akses mereka terhadap sumber pendanaan formal. Untuk menjawab tantangan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tahun 2016 (Oktari, 2023). SAK EMKM dirancang dengan pendekatan yang sederhana, relevan, dan mudah dipahami oleh pelaku usaha, mencakup penyusunan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, serta catatan atas laporan keuangan secara ringkas. Penerapan standar ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan UMKM, serta memperkuat posisi mereka dalam mengakses bantuan modal dan investasi (IAI, 2016).

Secara keseluruhan, keterkaitan antara investasi, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan yang baik melalui penerapan SAK EMKM menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM (Musriani & Sanaba, 2024). Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi teori investasi serta regulasi terkait menjadi hal yang esensial dalam menilai efektivitas pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM (Anggraini & Alfrian, 2019).

Bantuan Modal Usaha

Theory Investment merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan ekonomi, baik dalam skala makro maupun mikro. Tandellin (2010) mendefinisikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya pada saat ini, dengan harapan akan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi tidak hanya berfungsi untuk memperoleh laba, tetapi juga mencerminkan pengorbanan konsumsi saat ini demi keberlangsungan dan pengembangan usaha. Dalam lingkup usaha kecil dan menengah, investasi biasanya diwujudkan dalam bentuk penambahan aset tetap seperti alat produksi, kendaraan operasional, serta peningkatan modal kerja.

Pembiayaan investasi menjadi faktor krusial bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya. Pembiayaan dapat bersumber dari modal sendiri, pinjaman perbankan, ataupun pembiayaan berbasis kemitraan. Modal ventura menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang penting bagi usaha yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi namun belum bankable, sebagaimana diatur dalam KMK No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Modal Ventura. Otoritas Jasa Keuangan juga telah menetapkan POJK No. 35/POJK.05/2018 yang mengatur penyelenggaraan perusahaan pembiayaan, termasuk skema sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan multiguna. Skema-skema ini ditujukan untuk memperluas akses pendanaan bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki jaminan konvensional.

Sementara itu, investasi dalam skala nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip investasi seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki mandat mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal, dalam negeri maupun asing, termasuk di sektor UMKM.

METODE, DATA DAN ANALISIS

Jenis Penelitian Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang tidak melibatkan perhitungan angka, melainkan berfokus pada karakteristik alami dari sumber data (Susanto & Jailani, 2023). penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang

dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara menyeluruh (Rukin, 2019) Pendekatan ini dilakukan dengan cara deskriptif menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks yang alami, serta memanfaatkan berbagai metode yang sesuai dengan kondisi alamiah. Lokasi penelitian Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat. Penelitian difokuskan pada beberapa pelaku UMKM yang tersebar di beberapa distrik, seperti Aimas dan sekitarnya. Informan dalam penelitian ini terdiri dari lima pelaku UMKM dan satu pendamping UMKM yang berada di Kabupaten Sorong. Para pelaku UMKM berasal dari berbagai jenis usaha, seperti kuliner, perdagangan, dan kerajinan tangan, yang tersebar di beberapa distrik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) (Munzir, Difinubun, et al., 2024) dengan pelaku UMKM dan pendamping UMKM (Difinubun et al., 2025) di Kabupaten Sorong. Wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas usaha dan bentuk pencatatan keuangan yang digunakan oleh pelaku UMKM. Teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang akurat, kontekstual (Wijaya, 2020), dan sesuai dengan realitas di lapangan terkait implementasi pencatatan keuangan berbasis SAK EMKM dalam konteks pemberian bantuan modal usaha. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik secara manual. Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis melalui proses reduksi data, kategorisasi, dan penarikan tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti mengelompokkan jawaban informan berdasarkan indikator tertentu, seperti pemahaman terhadap SAK EMKM, bentuk pencatatan keuangan, serta keterkaitannya dengan bantuan modal usaha. Penulis melakukan uji keabsahan data untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama: Credibility, kecermatan penelitian, dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut Deskripsi Informan dan Lokasi Penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Deskripsi Informan dan Lokasi Penelitian

No	Nama UMKM (Insial Informan)	Jenis Usaha	Estimasi Omzet Tahunan (Rp)	Kriteria UMKM	Alamat
1	Salwa Cookies (BM)	Produksi dan penjualan kue kering	± 120.000.000 – 180.000.000	Mikro	Katapop 1 Majaran Kabupaten Sorong
2	Lapak Sayur Safana (IS)	Penjualan sayur dan kebutuhan dapur	± 60.000.000 – 120.000.000	Mikro	Aimas Kabupaten Sorong
3	Kedai Dealy Smoothie (MF)	Minuman jus dan smoothie sehat	± 60.000.000 – 120.000.000	Mikro	Mayamuk Kabupaten Sorong
4	Lapak Neng Rika (MR)	Siomay dan aneka dimsum	± 60.000.000 – 120.000.000	Mikro	SP 4 Kabupaten Sorong
5	Rumah Etnik Papua (KR)	Wisata, kerajinan tangan, aksesoris	± 120.000.000 – 180.000.000	Mikro	Aimas Kabupaten Sorong

No	Nama UMKM (Insial Informan)	Jenis Usaha	Estimasi Omzet Tahunan (Rp)	Kriteria UMKM	Alamat
		khas Papua			Sorong

Sumber olahan data peneliti (2025)

Berdasarkan table 1 data yang dikumpulkan dari lima pelaku UMKM di Kabupaten Sorong, diketahui bahwa rata-rata omzet bulanan mereka berada pada kisaran Rp 5.000.000 hingga Rp 15.000.000. Jika dikalkulasikan secara tahunan, omzet mereka berkisar antara Rp 60.000.000 hingga Rp 180.000.000. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, pelaku usaha dengan omzet tahunan tidak melebihi Rp 300.000.000 dikategorikan sebagai Usaha Mikro.

Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Sorong masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana, bahkan ada yang sama sekali tidak melakukan pencatatan. Pencatatan yang dilakukan umumnya hanya sebatas mencatat pemasukan dan pengeluaran harian, tanpa menyusun laporan laba rugi, neraca, atau arus kas. Selain itu, belum terdapat pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan usaha, yang menyebabkan ketidakteraturan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti klasifikasi akun, pencatatan periodik, dan penyusunan laporan keuangan berkala belum diterapkan.

Namun demikian, terdapat indikasi positif dari salah satu informan yang mulai menerapkan pencatatan keuangan dengan lebih terstruktur. Informan tersebut memisahkan pendapatan dan biaya, serta mencatat aset usaha secara mandiri. Hal ini membuktikan bahwa dengan dukungan dan pelatihan yang tepat, pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan usahanya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan pendampingan teknis dan pelatihan akuntansi yang berkelanjutan. Implementasi SAK EMKM secara bertahap dinilai mampu membantu UMKM menyusun laporan keuangan yang lebih akuntabel, sehingga meningkatkan peluang mereka dalam memperoleh pembiayaan atau investasi di masa depan.

Sumber Dan Cara Akses Modal Usaha Oleh Pelaku UMKM

Dalam upaya mendapatkan pembiayaan, pemilik UMKM dituntut untuk memahami jumlah dan jenis modal yang diperlukan untuk mendukung aktivitas dan pertumbuhan usaha mereka. Meskipun terdapat berbagai sumber pembiayaan seperti pembiayaan internal (bootstrap), hutang, maupun ekuitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Sorong masih sangat bergantung pada modal pribadi. Modal ini umumnya berasal dari tabungan pribadi, keuntungan usaha, atau dukungan keluarga, tanpa adanya akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Hal ini tercermin dari pernyataan sebagian besar informan yang mengaku belum pernah mendapatkan bantuan modal baik dari pemerintah maupun pihak bank.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya hambatan dalam mengakses pembiayaan eksternal, baik karena kurangnya informasi, tidak adanya pendampingan, maupun karena keterbatasan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang layak. Dalam perspektif Theory of Investment, ketiadaan data keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan membuat pelaku UMKM sulit menunjukkan kelayakan dan prospek usaha mereka kepada calon investor atau lembaga keuangan. Dengan kata lain, rendahnya literasi akuntansi serta lemahnya sistem pencatatan menjadi penghalang utama dalam membangun kepercayaan dan memperoleh dukungan pembiayaan. Satu-satunya pengecualian adalah informan dari Rumah Etnik Papua yang telah memperoleh bantuan non-dana dalam bentuk pelatihan dan alat produksi dari lembaga resmi, serta mulai menerapkan

pencatatan keuangan yang lebih sistematis. Hal ini membuktikan bahwa ketika pelaku usaha memperoleh pendampingan yang tepat, mereka lebih siap untuk memenuhi kriteria kelayakan investasi dan mengakses bantuan modal dengan lebih baik.

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha UMKM Dalam Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Di Kabupaten Sorong

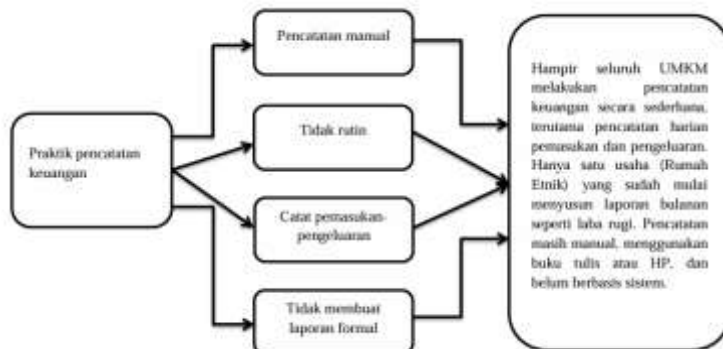
Hambatan utama berasal dari minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap konsep akuntansi dasar, kurangnya pelatihan teknis, serta terbatasnya waktu dan sumber daya manusia dalam operasional harian. Hal ini tergambar jelas dari pernyataan para informan, seperti pemilik Salwa Cookies dan Lapak Sayur Safana, yang mengaku tidak memiliki latar belakang akuntansi dan hanya melakukan pencatatan sederhana sebatas pemasukan dan pengeluaran. Sebagian besar informan juga mengakui bahwa istilah-istilah akuntansi seperti aset, beban, dan kewajiban belum mereka pahami, sehingga menyulitkan dalam menyusun laporan sesuai SAK EMKM.

Lebih lanjut, keterbatasan waktu karena fokus utama pada kegiatan produksi dan penjualan menjadi alasan tambahan yang membuat pelaku UMKM enggan atau tidak mampu melakukan pencatatan secara teratur. Kendala ini tidak hanya terjadi pada usaha mikro, tetapi juga pada usaha yang tergolong lebih berkembang seperti Rumah Etnik Papua, yang walaupun telah menyadari pentingnya pencatatan, masih kesulitan dalam menyusun laporan seperti neraca atau laporan laba rugi. Meski demikian, terdapat harapan positif yang muncul dari para pelaku usaha, di mana beberapa informan menyatakan keinginan untuk belajar dan mengikuti pelatihan pencatatan keuangan apabila tersedia. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan, maupun pendamping UMKM untuk melakukan intervensi melalui edukasi dan pelatihan berbasis praktik. Tanpa adanya pendampingan dan peningkatan literasi akuntansi, penerapan SAK EMKM masih akan menghadapi tantangan besar dalam konteks UMKM di wilayah ini.

Pembahasan

Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan Oleh Pelaku UMKM di Kabupaten Sorong

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap lima pelaku UMKM di Kabupaten Sorong, ditemukan bahwa penerapan pencatatan laporan keuangan oleh pelaku usaha masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Secara umum, pelaku UMKM di wilayah ini masih menjalankan praktik pencatatan yang sangat sederhana dan terbatas, dengan fokus utama pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian secara manual.



Dari kelima informan yang diwawancarai, hanya satu pelaku usaha yang menunjukkan inisiatif untuk mulai menyusun pencatatan keuangan secara lebih terstruktur. Usaha tersebut telah mencoba memisahkan pencatatan pendapatan, biaya, dan aset, meskipun belum secara penuh mengacu pada prinsip dan format yang ditetapkan dalam SAK EMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan mulai tumbuh, meski masih

terbatas.

Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan pencatatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM di kalangan UMKM Kabupaten Sorong masih sangat rendah. Belum adanya sistem pencatatan yang terstandarisasi menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam mengelola keuangan usaha secara optimal, serta berdampak pada rendahnya kemampuan mereka dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk mengakses pembiayaan atau bantuan modal dari lembaga formal.

Dengan demikian, diperlukan intervensi dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan intensif yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas pelaku UMKM di daerah ini. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi akuntansi dan mendorong pelaku usaha untuk secara bertahap menerapkan SAK EMKM dalam pengelolaan keuangan mereka, demi mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Pelaku UMKM di Kabupaten Sorong biasanya memprioritaskan aspek operasional dan pemasaran dari pada pengelolaan administrasi dan keuangan. Ketika mereka di beri informasi atau pelatihan tentang SAK EMKM, mereka sering merasa terbebani oleh istilah-istilah teknis atau format pelaporan yang di anggap tidak sesuai dengan kondisi bisnis sebenarnya. Akibatnya, meskipun banyak orang tahu bahwa laporan keuangan penting, banyak orang masih tidak melakukannya sendiri tanpa bantuan professional. belajar dan memperbaiki sistem pencatatan mereka sesuai standar.

Akses Pelaku UMKM Terhadap Bantuan Modal Usaha Dengan Pendekatan Theory Investment

Mayoritas pelaku usaha memulai dan mengembangkan usahanya dengan modal pribadi, baik berasal dari tabungan sendiri maupun dari hasil penjualan usaha secara bertahap. Modal usaha lebih banyak diperoleh secara organik melalui perputaran hasil keuntungan usaha, bukan dari pinjaman atau bantuan eksternal. Hanya satu informan yang pernah menerima bentuk dukungan non-tunai seperti fasilitas sarana usaha, bukan dalam bentuk dana segar.

Keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam mengakses bantuan modal formal. Hal ini dikarenakan lembaga penyedia pembiayaan, baik perbankan maupun lembaga pemerintah, umumnya mensyaratkan adanya laporan keuangan yang kredibel sebagai dasar analisis kelayakan usaha. SAK EMKM dibuat untuk membuat pencatatan dan pelaporan keuangan lebih mudah bagi UMKM dalam bantuan modal usaha, teori investasi membutuhkan pencatatan yang transparan dan akuntabel. SAK EMKM memungkinkan bantuan modal tambahan atau liabilitas, tergantung pada jenis dan syarat bantuan.

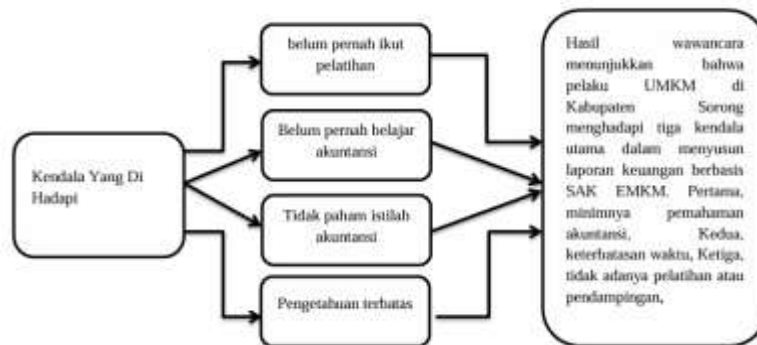


Sebagai hasil dari wawancara yang di lakukan dengan sejumlah pelaku UMKM, terlihat bahwa sebagian besar dari mereka belum menggunakan SAK EMKM dalam pencatatan usahanya. Banyak bisnis masih melakukan pencatatan keuangan yang sangat sederhana, bahkan ada yang sama sekali tidak melakukannya secara formal. Hal ini di sebabkan oleh kurangnya sumber daya

pengetahuan dan pelatihan serta pemahaman yang masih buruk tentang pentingnya standar akuntansi. Namun SAK EMKM sangat penting untuk mengontrol laporan keuangan yang dapat di gunakan sebagai alat pengambilan keputusan para pelaku usaha dan pihak investor dan lembaga pemberi modal.

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam kerangka Theory of Investment, pelaku UMKM di Sorong masih berada pada tahap awal investasi yang sangat terbatas pada sumber internal (internal financing). Minimnya akses ke modal eksternal disebabkan oleh tidak terpenuhinya prasyarat administratif, termasuk tidak adanya pencatatan keuangan formal. Maka, jika pelaku UMKM mampu menerapkan pencatatan sesuai SAK EMKM, maka hal tersebut dapat meningkatkan kredibilitas usaha dan membuka peluang lebih besar untuk memperoleh bantuan atau pembiayaan yang layak.

Factor-Faktor Yang Menyebabkan Laporan Keuangan Pelaku UMKM Tidak Menerapkan SAK EMKM



1. Rendahnya Literasi dan Minimnya Pemahaman SAK EMKM

Salah satu alasan utama mengapa laporan keuangan pelaku UMKM tidak menerapkan SAK EMKM adalah mereka tidak terbiasa dengan akuntansi. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong kurang memahami konsep akuntansi dasar seperti pengklasifikasian akun, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan yang teratur. Akuntansi masih dianggap rumit dan tidak terlalu penting untuk bisnis sehari-hari. Orang masih menganggap akuntansi sebagai sesuatu yang rumit dan tidak terlalu penting untuk bisnis sehari-hari.

Kondisi ini menjadi lebih buruk karena banyak pelaku UMKM tidak tahu SAK EMKM sebagai standar akuntansi khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini menunjukkan bahwa SAK EMKM belum tersosialisasi dengan baik di tingkat akar rumput bisnis.

Akses yang tidak memadai terhadap pendampingan atau pelatihan juga meningkatkan perbedaan pemahaman ini. Tanpa pelatihan yang berkelanjutan, usaha kecil dan menengah (UMKM) cenderung menggunakan metode pencatatan yang sangat sederhana, bahkan hanya berdasarkan ingatan atau pencatatan tidak rutin. Akibatnya, mereka tidak memiliki laporan keuangan yang layak untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha, atau pengajuan bantuan modal ke lembaga keuangan.

2. Fokus Pada Operasional dan Keterbatasan Waktu

Salah satu kendala utama dalam menerapkan pencatatan keuangan berbasis SAK EMKM adalah keterbatasan waktu. Pelaku usaha kecil cenderung menunda atau bahkan mengabaikan pencatatan keuangan karena mereka lebih fokus pada menjaga kelangsungan bisnis dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

Selain itu, bisnis kecil dan menengah (UMKM) biasanya tidak memiliki tenaga kerja yang khusus menangani masalah keuangan. Dengan demikian, pemilik usaha harus mengambil tanggung jawab pencatatan keuangan sendiri, menyebabkan proses yang tidak berkelanjutan. Meskipun pemilik usaha menyadari pentingnya pencatatan, mereka seringkali tidak mampu meluangkan waktu untuk menyusun laporan sesuai dengan persyaratan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM di kalangan UMKM tidak hanya bergantung pada pengetahuan dan kemampuan teknis, tetapi juga pada kemampuan manajemen dan alokasi waktu yang cukup. Tanpa struktur usaha yang memungkinkan pembagian tugas, pelaku UMKM akan terus mengalami kesulitan dalam menyelaraskan pencatatan keuangan dengan tuntutan operasional bisnis mereka.

3. Tidak Ada Pelatihan Atau Pendampingan Teknis

Salah satu faktor utama yang menghalangi pelaku UMKM untuk menerapkan SAK EMKM adalah mereka tidak memiliki pelatihan atau pendampingan teknis. Meskipun kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan telah meningkat, sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki akses ke sumber pendidikan yang memadai, seperti pelatihan langsung, modul, atau bimbingan teknis yang berkelanjutan.

Pelaku UMKM mungkin ragu untuk mulai mencatat laporan keuangan secara sistematis jika mereka tidak menerima pelatihan resmi dari lembaga terkait. Standar akuntansi seperti SAK EMKM mengandung konsep teknis yang sulit dipahami jika tidak diberikan penjelasan kontekstual dan sederhana. Tidak adanya pedoman praktis yang disesuaikan dengan kondisi UMKM membuat standar ini tidak familiar dan sulit diterapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan oleh UMKM di Kabupaten Sorong. Mayoritas pelaku UMKM di Kabupaten Sorong belum menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat sangat sederhana, terbatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian, bahkan ada yang tidak melakukan pencatatan sama sekali. Hanya sebagian kecil UMKM yang mulai berupaya melakukan pencatatan lebih terstruktur meskipun belum sepenuhnya mengacu pada standar yang berlaku.
2. Akses Pelaku UMKM terhadap Bantuan Modal Usaha dengan Pendekatan Theory of Investment Pelaku UMKM pada umumnya mengandalkan modal sendiri atau hasil dari perputaran usaha untuk membiayai operasional dan pengembangan usaha. Akses terhadap bantuan modal dari pihak eksternal seperti pemerintah atau lembaga keuangan masih sangat terbatas. Hal ini berhubungan erat dengan ketidakmampuan pelaku UMKM dalam menyediakan laporan keuangan formal yang menjadi salah satu syarat utama pengajuan bantuan atau pinjaman usaha. Dalam konteks teori investasi, kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM di Sorong masih berada pada tahap investasi internal dan belum mampu mengakses investasi eksternal secara optimal.
3. Kendala UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAK EMKM Terdapat tiga kendala utama yang dihadapi UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar, yaitu: (a) kurangnya pemahaman dan literasi akuntansi, (b) keterbatasan waktu karena fokus pada kegiatan operasional harian, dan (c) belum tersedianya pendampingan serta sarana pencatatan yang memadai. Faktor-faktor ini membuat pelaku UMKM kesulitan dalam menerapkan SAK EMKM secara efektif, yang pada akhirnya juga membatasi potensi usaha dalam hal pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan.

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah di kemukakan, adapun saran penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku UMKM Diharapkan pelaku UMKM mulai menyadari pentingnya pencatatan keuangan dan berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang akuntansi dasar serta SAK EMKM. Pelaku usaha dapat memulai dengan pencatatan sederhana yang lebih sistematis dan perlahan beradaptasi dengan format standar yang dianjurkan.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait Pemerintah melalui dinas koperasi, UMKM, dan lembaga pendamping perlu menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan rutin mengenai pencatatan keuangan berbasis SAK EMKM. Selain itu, perlu disediakan akses teknologi yang sederhana dan sesuai dengan kapasitas pelaku UMKM untuk mendukung pencatatan keuangan.
3. Bagi Lembaga Keuangan dan Pemberi Modal Lembaga keuangan dan pemberi bantuan modal perlu memperhatikan kondisi riil UMKM di daerah, dan mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam menilai kelayakan usaha. Kolaborasi dengan pendamping UMKM dan program literasi keuangan dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan administrasi pembiayaan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian selanjutnya disarankan untuk menjangkau lebih banyak informan dan menggunakan pendekatan kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif untuk memperkuat generalisasi hasil. Selain itu, fokus penelitian dapat diperluas ke strategi peningkatan literasi akuntansi bagi UMKM di berbagai sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- amanda, A. T., & Rialdy, N. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah Serta Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Usaha Pada Umkm Kota Dumai. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 8(1), 1812–1829. <https://doi.org/10.31955/Mea.V8i1.3916>
- Anggraini, A., & Alfrian, A. A. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Rumah Lele" Rule" Desa Manah Resmi Kecamatan Musi Rawas. *Jurnal Akuntanika*.
- Asriani, N. (2023). *Jurnal Fase Kemajuan Sosial Dan Politik:Faksi* |. 9(3), 11–20.
- Difinubun, Y., Salmi, N., Andika, D., Aziz, A., Dewi, T. W., Marsaoly, M., & Mawar, P. (2025). Pemberdayaan Pemberdayaan Kwt Melalui Pelatihan Packaging Kratif Dan Pemasaran Digital Untuk Meningkatkan Daya Saing: Bemberdayaan Kwt. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 8–12.
- Hanum, F., Yana, S., & Mauliza, P. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Perekonomian*. Mega Press Nusantara.
- Judijanto, L., Respati, R. D., Kartini, R. A., & Difinubun, Y. (2025). Bibliometric Analysis On Ecotourism And Cultural Tourism Development. *West Science Interdisciplinary Studies*, 3(3), 552–564.
- Maryani, M., & Abidin, Z. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang). *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(3), 392–405.
- Mulyani, A. S., Nurhayaty, E., & Miharja, K. (2019). Penerapan Pencatatan Dan Laporan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). *Jurnal Abdimas Bsi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 219–226.
- Munzir, M. (2023). Tingkat Pengalaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Sosialisasi Sak Emkm Terhadap Pemahaman Sak Emkm (Studi Umkm Pada Kabupaten Sorong). *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10.
- Munzir, M., Anwar, V., Henraman, H., Budi, R., Mikir, S., & Katumlas, M. M. (2024). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm Pada Umkm Mama-Mama Papua Di Kabupaten Sorong. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 523–531.
- Munzir, M., Difinubun, Y., Wulandary, A., Azisah, N., Astuti, S., & Darmayanti, I. (2024). Budgeting And Control Problems In Warmon Kokoda Village, Sorong Regency. *Jurnal Akuntansi Stie Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 56–63.
- Munzir, M., Zulkifli, Z., Sabaria, S., Wanda, R. F., Way, A., & Marchivanalia, P. O. (2024).

- Assistance In Preparing Financial Reports For Houses Of Worship With Isak 35 Standards In Sorong. *Journal Of Community Service And Empowerment*, 5(1), 147–154.
- Musriani, M., & Sanaba, H. F. (2024). Preferences Of Traditional Market Traders In Deciding To Use Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) As A Transaction Tool. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 1463–1471.
- Oktari, N. (2023). *Kesiapan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Umkm Di Kelurahan Sui. Bangkong, Pontianak Kota)*. Universitas Islam Indonesia.
- Rialdy, N., & Melisa, A. T. (2023). Pendampingan Kewirausahaan Dalam Peningkatan Kinerja Pelaku Umkm Di Desa Purwobinangun. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 85–94.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Siti Ardila, S. A. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Pertumbuhan Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020*. Universitas Batanghari.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
- Way, A., & Wulandary, A. (2025). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat). *Multidisciplinary Journal Of Education, Economic And Culture*, 3(1), 1–15.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.